



**IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS) PADA SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN
(Studi Kasus Pada SMK Negeri 3 Sumbawa Besar)**

Jhon Kenedi¹, Arbi Batulante^{2*}
FKIP. Universitas Samawa
***E-mail: batulantearbi@gmail.com**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMK Negeri 3 Sumbawa Besar. Sehingga dengan adanya penelitian ini memberikan gambaran bagi para pemangku kepentingan di daerah tentang bagaimana bentuk implementasi terhadap MBS sebagai bentuk desentralisasi kebijakan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dipilihnya pendekatan kualitatif karena peneliti akan memperoleh informasi secara mendalam berkaitan dengan bagaimana kebijakan MBS pada sekolah kejuruan. Jenis penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi kasus (*case study*). Untuk memperoleh data pada penelitian ini dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman stakeholder yang ada di SMK 3 Sumbawa Besar terkait tentang Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yaitu pemberian kewenangan kebijakan pendidikan dari jenjang di atas baik pemerintah pusat, provinsi kabupaten dan kota kepada satuan pendidikan. Kewenangan yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan diberikan keluasaan untuk mengelolah, memanfaatkan serta memberdayakan sumber daya sekolah seoptimal mungkin. Bentuk partisipasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam Manajemen Berbasis Sekolah, semua kegiatan sekolah selalu melibatkan seluruh warga sekolah baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi dari semua kegiatan yang telah dilaksanakan.

Kata kunci: *Manajemen Berbasis Sekolah, SMK*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu elemen penting Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Indeks*). Oleh karena itu, hampir setiap negara menempatkan pendidikan sebagai salah satu sektor yang menjadi prioritas dalam pembangunannya tak terkecuali di Indonesia. Di Indonesia, pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa:

Sistem Pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan.

Dalam konteks penegasan ketentuan di atas disebutkan efisiensi manajemen pendidikan dimaksudkan sebagai Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). *School Based Management* atau disebut juga MBS merupakan salah satu kebijakan pendelegasian kewenangan pada tingkat satuan pendidikan, dengan harapan pengelolaan pendidikan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Kemudian dengan adanya kewenangan tersebut terjadi kemandirian bagi sekolah untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya. Ringkasnya



dengan adanya kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), tingkat satuan pendidikan dapat melakukan analisis kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan serta evaluasi kinerja terhadap pengelolaan lembaga pendidikan.

Di samping itu, kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah juga merupakan salah satu aktualisasi dari kebijakan desentralisasi pendidikan yang sebelumnya bersifat sentralistik, sebagaimana dikemukakan oleh Hendyat Soetopo (2009:2) desentralisasi pendidikan merupakan “proses pendelegasian wewenang penyelenggaraan pendidikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah”. Musbir (2014) Manajemen Berbasis Sekolah pada intinya adalah memberikan kewenangan terhadap sekolah untuk melakukan pengelolaan dan perbaikan kualitas secara terus menerus. Sementara Huda AY (2010:55) otonomi pengelolaan pendidikan merupakan “suatu wahana pemberdayaan lembaga pendidikan yang diwujudkan dalam konsep Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) dan Manajemen Berbasis Sekolah (*School Based Management*)”. Oleh karena itu dampak dari adanya kebijakan desentralisasi melalui MBS diantaranya organisasi penyelenggara pendidikan, kurikulum, penataan sumber daya manusia, pendanaan, sistem pengelolaan, sarana dan sarana pendidikan.

Persoalan yang muncul meski sekolah telah memiliki otonom pasca diterbitnya kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) diantaranya masih adanya intervensi dalam pengelolaan lembaga pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Selain itu, sekolah belum memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki dalam penyelenggaraan pendidikan seperti minimnya partisipasi masyarakat dan fungsi kontrol masyarakat.

Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu daerah otonom yang telah memiliki kewenangan dalam melakukan pengelolaan pendidikan di daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu kewenangan-kewenangan tersebut telah didesentralisasi pada tingkat satuan pendidikan. Kenyataan tersebut dapat dilihat dengan adanya kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh masing-masing sekolah sesuai dengan potensi-potensi yang dimilikinya seperti sekolah-sekolah model, pernah ada sekolah yang memiliki status sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), SMK Pusat Keunggulan, SMK BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). Meski sekolah-sekolah tersebut memiliki otonom akan tetapi nampak kebijakan masih ada yang harus dikoordinasikan oleh sekolah-sekolah pada Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan misalnya kegiatan sekolah dikoordinasikan dan meminta persetujuan kepala cabang dinas.

Hasil pengamatan awal peneliti di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 3 Sumbawa Besar dalam kaitannya dengan pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) menunjukkan bahwa kewenangan- kewenangan sudah mulai diimplementasikan seperti SMKN 3 sudah ditetapkan sebagai sekolah yang berbasis pada Seni dan Ekonomi Kreatif. Demikian kurikulum, sarana dan prasarana maupun tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dilengkapi memenuhi persyaratan untuk memenuhi ciri khas sekolah tersebut.

Berdasarkan pada uraian di atas maka penelitian ini disusun untuk mengetahui bagaimanakah implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMK Negeri 3 Sumbawa Besar. Sehingga dengan adanya penelitian ini memberikan gambaran bagi para pemangku kepentingan di daerah tentang bagaimana bentuk implementasi terhadap MBS sebagai bentuk desentralisasi kebijakan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

METODE

Penelitian ini akan melakukan kajian terhadap bagaimanakah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMK Negeri 3 Sumbawa Besar . Oleh karena itu, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dipilihnya pendekatan kualitatif karena peneliti akan memperoleh informasi secara mendalam berkaitan dengan



bagaimana kebijakan MBS pada sekolah kejuruan. Di samping itu penelitian kualitatif, peneliti sekaligus sebagai instrumen penelitian.

Jenis penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi kasus (*case study*). Bambang Budi Wiyono (2008:77) menjelaskan bahwa studi kasus merupakan serangkaian kegiatan penyelidikan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara insentif dan terperinci suatu gejala atau unit sosial tertentu, seperti individu, kelompok, komunitas atau lembaga. Sedangkan Imron Arifin (1996:57) menjelaskan bahwa studi kasus merupakan sebagai suatu pendekatan yang bertujuan untuk mempertahankan keutuhan dari obyek. Oleh karena itu Jenis penelitian studi kasus pada penelitian ini berusaha untuk mengeksplorasi secara mendalam

Terhadap suatu program atau obyek penelitian lainnya yang berkaitan dengan bagaimanakah implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMK Negeri 3 Sumbawa Besar. Untuk memperoleh data pada penelitian ini dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Salah satu kebijakan pemerintah saat ini adalah adanya pemberian/pelimpahan kewenangan kepada pemerintahan di bawahnya untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Pada sektor pendidikan ada beberapa kebijakan pendidikan yang masih terpusat antara lain yaitu penetapan standar Nasional Pendidikan. Meski demikian pelimpahan kewenangan kebijakan pada sektor pendidikan sudah dilakukan sampai pada tingkat satuan pendidikan. Dalam kaitan dengan implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMK Negeri 3 Sumbawa Besar yaitu dengan langkah-langkah sebagaimana temuan penelitian yang dilakukan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi bahwa pandangan kepala sekolah terhadap Manajemen Berbasis Sekolah yaitu pemberian atau pendelegasian kewenangan yang dilakukan oleh sekolah untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Sementara pandangan guru terhadap Manajemen Berbasis Sekolah yang diterapkan di SMKN 3 dimana guru, peserta didik, kepala sekolah, karyawan secara langsung dapat meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di SMKN 3 Sumbawa Besar semua hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan diberikan keluasaan untuk mengelolah, memanfaatkan serta memberdayakan sumber daya sekolah seoptimal mungkin. Hal tersebut dilakukan melalui perpanjangan tangan kepala sekolah kepada wakil kepala sekolah dan diteruskan kepada seluruh warga sekolah.

Dalam mengimplementasikan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dimaksudkan agar sekolah-sekolah dapat memperbaiki mutu. Oleh karena itu untuk memperbaiki mutu SMK Negeri 3 Sumbawa Besar, selaku kepala sekolah sejak awal bertugas membuat komitmen dengan wakil kepala sekolah, ketua program studi, kepala bengkel setelah ada penetapan SK tugas maka secara teknis 75% itu ada menjadi tanggungjawab manajemen sekolah sedangkan 25%-nya adalah kebijakan kepala sekolah berupa pengambilan keputusan, evaluasi dan pengawasan sesuai deskripsi tugas berdasarkan SK kepala sekolah yang ditetapkan sebelumnya. Selain itu penting diingatkan kepada seluruh stakeholder sekolah keputusan akhirnya tetap ada pada manajemen puncak, artinya wakasek, kaprodi jangan sampai overlav makna 75% adalah bersifat teknis. Pemberian kewenangan tersebut terdiskripsi pada SK masing-masing seluruh personalia sekolah serta *job deskription*.

Perbaikan mutu baik mutu kurikulum, pembelajaran, kompetensi lulusan, kesiswaan, personalia, sarana dan prasarana. SMK Negeri 3 mengacu pada pedoman yang dikeluarkan



oleh dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan Peraturan Menteri terkait. Seperti BOSP dengan Juknis, BPP dengan juklak dengan penetapan skala prioritas sesuai kebutuhan sekolah. Perbaikan sarana dan prasarana yang bersumber dari DAK tetap melalui panduan teknis SMK sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian juga semua komponen di atas saling berkaitan dan berhubungan untuk membangun sekolah dan mencapai tujuan pendidikan seperti yang diamanatkan di dalam undang-undang.

Sekolah melakukan perencanaan terhadap beberapa komponen bidang pendidikan. Perencanaan dilakukan awal tahun melalui rapat bersama semua stakeholder sekolah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, artinya wakil kepala sekolah dan kaprodi menyusun draf Rencana Anggaran Biaya kebutuhan sesuai kebutuhan jurusan. Adapun perencanaan yang dilakukan oleh pihak sekolah terdistribusi pada Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) Sekolah tahun 2024 tergambar jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 860.400.000, diantaranya kegiatan sarana dan prasarana, humas, kesiswaan dan lain-lain. Tugas selanjutnya kepala sekolah bersama manajemen menganalisis kebutuhan skala prioritas yang harus ditetapkan sekolah. Setelah semuanya rampung maka selanjutnya pelaksanaan kegiatan program sekolah disertai pengawasan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan komite sekolah secara berkala. Apabila ada perubahan rencana maka diadakan rapat kesepakatan untuk penyempurnaan. Sementara untuk pengorganisasian kata kunci untuk menjaga kesetabilan adalah komunikasi dalam bersinergi sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Pengerahan dilakukan memberikan kesempatan kepada semua guru untuk berinovasi, berkreasi sesuai kompetensi untuk mengembangkan sekolah. Evaluasi dilakukan bersama sesuai tugas dan fungsi masing-masing dan setiap kegiatan program dibuat laporan baik lisan maupun tulisan untuk dilakukan tindak lanjut.

Kegiatan yang dilakukan oleh sekolah selalu melibatkan seluruh warga sekolah termasuk guru, sebagai bentuk bagaimana guru berpartisipasi dalam Manajemen Berbasis Sekolah, semua kegiatan sekolah selalu melibatkan seluruh warga sekolah baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi dari semua kegiatan yang telah dilaksanakan. Pelibatan seluruh stakeholder sekolah nampak pada kegiatan pemilihan pengurus komite sekolah SMKN 3 Sumbawa Besar yang berlangsung pada tanggal 06 Januari 2024 nampak hadir para orang siswa, para dewan guru, beberapa pengurus sebelumnya. Pada kegiatan tersebut juga dibahas terkait dengan Laporan Pertanggungjawaban pengurus sebelumnya, pembahasan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS), selanjutnya terpilih pengurus komite sekolah yang berasal dari orang tua siswa serta masyarakat peduli pendidikan. Transparansi yang dilakukan oleh sekolah pada Manajemen Berbasis Sekolah, semua pihak bekerja dengan maksimal tanpa ada kecurigaan baik yang terkait dengan keuangan maupun kebijakan lainnya. Kegiatan ini tergambar pada setiap program sekolah warga sekolah selalu terlibat, demikian juga setiap pengambilan keputusan selalu melibatkan seluruh warga sekolah.

Pembahasan

Pemahaman stakeholder yang ada di SMK 3 Sumbawa Besar terkait tentang Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yaitu pemberian kewenangan kebijakan pendidikan dari jenjang di atas baik pemerintah pusat, provinsi kabupaten dan kota kepada satuan pendidikan. Kewenangan tersebut dilakukan selain standarisasi pendidikan yang berada pada pemerintah pusat. Oleh karena itu sejalan dengan pengertian Manajemen Berbasis Sekolah yaitu bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah atau madrasah dan guru dibantu oleh komite sekolah atau madrasah dalam mengelola kegiatan pendidikan". Definisi MBS diuraikan lebih rinci sebagai suatu pendekatan politik yang bertujuan untuk melakukan redesign terhadap pengelolaan sekolah dengan memberikan kekuasaan pada kepala sekolah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya



perbaikan kinerja sekolah yang mencakup guru, siswa, kepala sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat (Fattah, 2004).

Lahinya MBS atau *school based management* sendiri dalam rangka upaya adaptasi dari paradigma pendidikan baru yang berasaskan desentralisasi. Kehadiran MBS memberikan otoritas pada sekolah untuk mengembangkan prakarsa yang positif untuk kepentingan sekolah. Otonomi tersebut diberikan agar sekolah dapat mengelola sendiri sekolahnya. Sehingga pada akhirnya sekolah mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk melakukan kreasi, inovasi dan improvisasi dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu. MBS adalah model pengelolaan sekolah berdasarkan kekhasan, karakteristik, kemampuan, dan kebutuhan sekolah tetapi harus tetap pada koridor arah kebijakan pendidikan nasional.

Tujuan utama MBS adalah meningkatkan efisiensi, mutu dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya yang ada, partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi. Peningkatan mutu melalui orang tua, kelenturan pengelolaan sekolah, peningkatan profesionalisme guru, adanya hadiah dan hukuman sebagai kontrol serta hal lain yang dapat menumbuh-kembangkan suasana kondusif. Pemerataan pendidikan tampak pada partisipasi masyarakat yang mampu dan peduli, sementara yang kurang mampu menjadi tanggung jawab (Sukarti, Udik Budi Wibowo, 2013). Kebijakan MBS yang ada di SMK Negeri 3 Sumbawa Besar diharapkan untuk meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, meningkatkan tanggungjawab kepala satuan pendidikan, meningkatkan kompetensi sehat antar satuan pendidikan serta meningkatkan efisiensi, relevansi dan pemerataan pendidikan

Kehadiran MBS pada SMK Negeri 3 Sumbawa Besar untuk memperbaiki mutu yang ada di sekolah, selaku kepala sekolah memiliki komitmen pelimpahan kewenangan kepada seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Implementasi MBS secara ideal mensyaratkan beberapa hal yaitu (1) peningkatan kualitas manajemen sekolah yang terlihat melalui transparansi keuangan, perencanaan partisipatif, dan tanggung-gugat (akuntabilitas), (2) peningkatan pembelajaran melalui PAKEM (pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan), dan (3) peningkatan peran serta masyarakat melalui intensitas kepedulian masyarakat terhadap sekolah (Kusmanto, 2004). Pelaksanaan manajemen berbasis sekolah secara efektif dan efisien, kepala sekolah perlu memiliki pengetahuan kepemimpinan, perencanaan, dan pandangan yang luas tentang sekolah dan pendidikan

Tujuan implementasi program Manajemen Berbasis Sekolah adalah untuk mencapai peningkatan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan, sejalan dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, pendidikan diselenggarakan dengan prinsip pemberdayaan seluruh komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Diharapkan dengan menerapkan manajemen dengan pola MBS, sekolah lebih berdaya dalam beberapa hal sebagaimana berikut: (1) menyadari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi sekolah tersebut, (2) mengetahui sumber daya yang dimiliki dan input pendidikan yang akan dikembangkan, (3) mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk kemajuan lembaganya, (4) bertanggung jawab terhadap orang tua, masyarakat, lembaga terkait, dan pemerintah dalam penyelenggaraan sekolah, (5) dan persaingan sehat dengan sekolah lain dalam usaha-usaha kreatif inovatif untuk meningkatkan layanan dan mutu pendidikan

Sukardi Ikhsan dan Indah Anisykurlillah (2010) fungsi manajemen sekolah dilihat dari aktivitas atau kegiatan manajemen meliputi: a) Kegiatan manajerial yang dilakukan oleh para pimpinan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, penilaian, pelaporan dan penentuan anggaran. b. Kegiatan yang bersifat operatif, yakni kegiatan yang dilakukan oleh para pelaksana. Kegiatan ini berkaitan langsung



dengan pencapaian tujuan. Fungsi operatif meliputi ketatausahaan, perbekalan, kepegawaian, keuangan dan humas

Nasaruddin dan Muslimin (2018) dalam kaitannya masyarakat dengan aspek pemberdayaan dalam memahami dan menerapkan manajemen berbasis sekolah sebagai proses pemberdayaan terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, seperti dijelaskan berikut diantaranya: Menggunakan pendekatan partisipatif dari prinsip tersebut beberapa konsep yang perlu diaktualisasikan adalah (a) merumuskan tujuan bersama antar sekolah dan masyarakat (b) menyikapi peluncuran program manajemen berbasis sekolah sebagai proses dialog, dan (c) melakukan pembangunan sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian di atas maka dapat disimpulkan beberapa hal terkait dengan Implementasi MBS pada SMK Negeri 3 Sumbawa Besar sebagai berikut:

1. Pemahaman stakeholder yang ada di SMK 3 Sumbawa Besar terkait tentang Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yaitu pemberian kewenangan kebijakan pendidikan dari jenjang di atas baik pemerintah pusat, provinsi kabupaten dan kota kepada satuan pendidikan
2. Di SMKN 3 Sumbawa Besar semua hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan diberikan keluasaan untuk mengelola, memanfaatkan serta memberdayakan sumber daya sekolah seoptimal mungkin.
3. Kegiatan yang dilakukan oleh sekolah selalu melibatkan seluruh warga sekolah termasuk guru, sebagai bentuk bagaimana guru berpartisipasi dalam Manajemen Berbasis Sekolah, semua kegiatan sekolah selalu melibatkan seluruh warga sekolah baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi dari semua kegiatan yang telah dilaksanakan

SARAN

Diharapkan kepada seluruh stakeholder yang ada di SMK Negeri 3 Sumbawa Besar baik kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dewan guru, serta tenaga kependidikan yang lain agar lebih mengoptimalkan pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah. Sehingga pada akhirnya SMK Negeri 3 memiliki karakteristik yang berbeda dari sekolah kejuruan yang lain, selain itu diharapkan kepala sekolah untuk mendukung program yang ada di sekolah agar melibatkan pihak yang ada di luar sekolah baik Dunia Usaha dan Dunia Industri serta alumni.

DAFTAR PUSTAKA

- Dikson Silitonga. 2020. *Evaluasi Implementasi Program Manajemen Berbasis Sekolah Pada SMK Negeri 3 Jakarta*. ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis, Vol. 23 No. 3, 2020
- Hendyat Soetopo. 2009. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Fakultas Ilmu Pendidikan UM
- Huda AY. 2010. *Kajian Filosofis Otonomi Daerah Bidang Pendidikan*. FIP UM
- Imron Arifin. 1996. *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan*: Kalimashada Pres
- Nasaruddin&Muslimin. 2018. *Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Pada SD Inpres Bira 1 Kota Makassar*. JIKAP PGSD: Jurnal Ilmiah Ilmu Kependidikan Vol.2. No.2. Tahun 2018
- Sukarti, Udik Budi Wibowo, 2013. *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMK Negeri di Kabupaten Sleman*. Jurnal Akutabilitas Manajemen Pendidikan Volume 1, Nomor 2



Sukardi Ikhsan&Indah Anisykurlillah. 2010. *Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah SMK Negeri dan SMK Swasta Se-Karasidenan Semarang*. Jurnal Pendidikan Ekonomi Dinamika Pendidikan. Vol. V, No. 1, Juni 2010 Hal. 1 – 19

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*,

Wiyono, Bambang Budi. 2008. *Metodologi Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Action Research)*. Malang: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang